

**PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGELOLA KEUANGAN DESA,
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP), DAN
PARTISIPASIMASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGANDESA
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Ilham Akbar¹⁾, Ruhul Fitrioso²⁾, Supriono²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email: iakbar625@gmail.com

The Effect of the competence of the village financial management apparatus, the government's internal control system, and community participation towards village financial management accountability

ABSTRACT

This study aims to determine (1) Does the competence of village financial management officials affect the accountability of village financial management, (2) Does the government's internal control system affect the accountability of village financial management, (3) Does community participation affect the accountability of village financial management. This study uses a questionnaire, the questionnaire is an instrument to obtain data by providing a list of questions that will be filled by respondents who were determined as research samples. The research sample is village officials who manage village finances, using the saturated sample method. The unit of analysis in this study consists of: Village Head, Secretary, and Kaur Element. So that the total sample in this study was 99 village officials. The analytical method used in the study is structural equation modeling (SEM) and the analysis instrument used is partial least squares (PLS) software. The results showed that the difficulty of competence of village financial management apparatus, the government's internal control system, and community participation affected the accountability of village financial management.

Keywords: the competence of the village financial management apparatus, the government's internal control system, community participation

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan demokratis, membutuhkan anggaran dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di suatu desa. Anggaran tersebut diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Secara Nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang cukup fantastis untuk sebuah program/kebijakan yang baru. Berdasarkan data pada Kementerian Keuangan RI (Nota Keuangan), jumlah dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebesar Rp.127,75 Triliun. Menurut BPKP pemberian dana desa yang begitu besar, jumlah

pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggungjawab yang besar pula oleh aparat pemerintah desa. Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas merupakan salah satu ciri-ciri dari suatu sistem pemerintahan yang baik atau good governance. Dengan adanya akuntabilitas maka good governance dapat di rasakan keberadaannya. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan permasalahan - permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa, yang mencerminkan pengelolaan yang tidak akuntabel. Jan Maringka Selaku Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Kejaksaan Agung juga memaparkan permasalahan dalam Dana Desa baik di tahap pengelolaan maupun tahap pertanggungjawaban. Di tahap pengelolaan, Dana desa dikelola sendiri oleh kepala desa tanpa melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan di desa. Di tahap pemanfaatan, antara lain terjadi mark up di sana-sini, seperti mark up biaya honorarium, proyek asal jadi atau tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Kemudian di tahap pertanggungjawaban seperti keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban tidak di lengkapi bukti dan dokumentasi. Selain itu, Tri Budhiato (2019) Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Riau, menyatakan beberapa faktor terjadinya masalah dalam pengelolaan dana desa. Menurut Tri Budhiato rendahnya pengetahuan aparat desa dalam menyusun APBDes dan laporan pertanggung jawaban masih menjadi momok yang cukup menakutkan bagi mereka, untuk tahun 2018, dana desa yang di salurkan sebesar Rp. 1,26 triliun, hanya mampu di serap Rp. 709 miliar saja. Hal tersebut di karenakan terlambatnya pemenuhan ketentuan persyaratan penyaluran seperti

APBDes, Laporan realisasi dan capaian output. Untuk di kabupaten Indragiri Hilir ada kasus korupsi dana desa yang mantan Pejabat Kepala Desa Panglima Raja dan Sekretaris Desa. keduanya melakukan korupsi anggaran pembangunan desa panglima raja. Berdasarkan Hasil audit BPKP Kerugian negara mencapai Rp.309.589.335. Selain kasus korupsi di Desa Panglima Raja, ada juga kasus markup pembelian bahan-bahaan kegiatan pembangunan fisik di Desa Tunas Jaya, yang bersumber dari anggaran dana desa dengan jumlah Rp. 78.149.850. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas adalah kompetensi. Menurut Cheng, Engstrom, & Kattelus(2002) menyebutkan bahwa kompetensi yang di miliki aparat pemerintah turut mempengaruhi akuntabilitas pemerintah desa. Artinya semakin kompeten aparat pengelola keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Faktor selanjutnya yaitu sistem pengendalian internal pemerintah. Aikins (2011) berpendapat bahwa pengawasan pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan melauai evaluasi dan perbaikan pengendalian internal, manaejemen resiko dan proses tata kelola pemerintahan, ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian akan berimplikasi dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dan faktor terakhir adalah partisipasi masyarakat. Menurut Crook dan Sverrisson dalam Devas dan Grant (2003:309) Akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Akuntabilitas akan tercapai jika adanya partisipasi dari masyarakat yang menyampaikan segala aspirasi serta kontribusi dalam proses pengelolaa keuangan desa. sehingga semakin tinggi partisipasi masyarakat

maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan judul : **“Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Indragiri Hilir**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Apakah kompetensi aparat pengelola keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ? 2) Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa ? 3) Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa ?

TELAAH PUSTAKA

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Mahmudi (2011:18) menyatakan akuntabilitas menurut Mahmudi adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal).

Kompetensi aparat pengelola keuangan desa

Berdasarkan peraturan kepala badan kepegawaian negara nomor 7 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan standar kompetensi manajerial pegawai negeri sipil, kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

1. Pengetahuan kerja adalah pengetahuan yang di miliki yang dimiliki PNS berupa fakta informasi, keahlian yang di peroleh seseorang melalui pendidikan dan pengalaman, baik teoritis maupun pemahaman praktis, dan berbagai hal yang di ketahui oleh PNS terkait dengan pekerjaannya serta kesadaran yang di peroleh PNS melalui pengalaman suatu fakta atau situasi dalam konteks pekerjaan.
2. Keterampilan kerja adalah keterampilan PNS untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan pekerjaan, yang meliputi :
 - a. Keterampilan melaksanakan pekerjaan individual (task skill)
 - b. Keterampilan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan (task management skill)
 - c. Keterampilan merespon dan mengelola kejadian/msalah kerja yang berbeda (contingency management skill)
 - d. Keterampilan khusus yang di perlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di tempat tertentu sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja (job/role environment skill)
 - e. Keterampilan beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan yang sama di tempat/lingkungan kerja yang berbeda (transfer skills)
3. Sikap kerja dalah perilaku PNS yang menekankan aspek perasaan dan emosi, berupa minat, sikap, apresiasi, dan cara penyelesaian diri terhadap pekerjaan

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

60 Tahun 2008 Pasal 1 (Ayat 1 dan 2) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

pengendalian intern terdiri dari 5 (lima) komponen yang berhubungan yaitu: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan.

Partisipasi Masyarakat

Sujarweni, 2015:29. Partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Keuangan desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Di dalam hal pengelolaan di butuhkan skill yang bagus dan mempunyai pengetahuan yang luas mengenai cara pengelolaan keuangan desa (mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban) tersebut, agar pengelolaan keuangan desa bisa berjalan sesuai dengan prosedur dan mencerminkan pengelolaan yang akuntabel. Jika aparat desa berkompeten dalam mengelola keuangan desa tentu saja akan meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan desa tersebut. Sebaliknya jika aparat tidak memiliki

sumber daya yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentu saja akuntabilitas tidak akan tercapai.

Cheng, Engstrom, & Kattelus (2002) menyebutkan bahwa kompetensi yang di miliki aparat pemerintah turut mempengaruhi akuntabilitas pemerintah desa. Artinya semakin kompeten aparat pengelola keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel.

Dalam penelitian yang di lakukan oleh Dwi Sapartiningsih, Suharno (2018), Ekasari Sugiarti dan Ivan Yudianto (2017), Putri Aulia (2018) bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa.

H1: kompetensi aparat pengelola keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Pengaruh System Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Penyelenggaraan kegiatan dalam suatu pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan secara andal, mengamankan aset dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Internal.

Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan

mengukur sumber daya suatu organisasi. Aikins (2011) berpendapat bahwa pengawasan pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui evaluasi dan perbaikan pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola pemerintahan, ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian akan berimplikasi dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Ivan Yudianto dan Ekasari Sugiarti (2017), Yustika Rezkiyanti (2019), Arif Widyatama, Lola Novita, dan Diarespati (2017), yang berkesimpulan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H2: sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

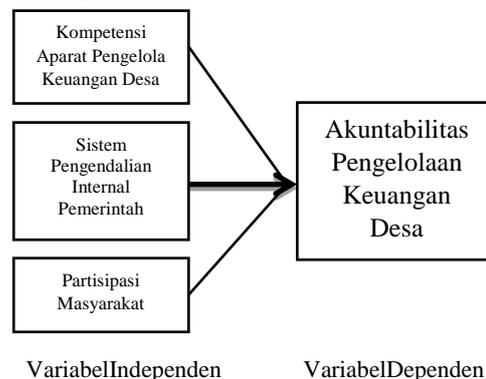
Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Berdasarkan asas pengelolaan desa yang dilakukan secara partisipatif, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran yang mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan. Akuntabilitas akan tercapai jika adanya partisipasi dari masyarakat yang menyampaikan segala aspirasi serta kontribusi dalam proses pengelolaan keuangan desa. Sehingga semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Menurut Crook dan Sverrisson dalam Devas dan Grant (2003:309) Akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri Aulia (2018), Siti Umaira dan Adnan (2019), Dwi Sapartiningsih, Suharno (2018), Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Model Penelitian

Gambar 1. Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh aparat desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, Dengan Populasi Target yaitu Kecamatan Tembilahan Hulu (4 Desa), Kecamatan Tempuling (5 Desa), Kecamatan Kempas (10 Desa), dan Kecamatan Batang Tuaka (12 Desa). sampel dalam penelitian yaitu aparat desa yang mengelola keuangan desa, dengan menggunakan metode sampel jenuh. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu yang terdiri dari : Kepala desa, Sekretaris, dan Unsur Kaur. Sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah 99 aparat desa.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Pengukuran untuk variabel ini menggunakan instrumen pertanyaan dengan skala sikap likert dengan lima alternatif jawaban dan masing-masing diberi skor yaitu: Selalu (SL:5), Sering (SR:4), Kadang-kadang (KK:3), Jarang (JR:2), Tidak pernah (TP:1).

Definisi Variabel dan Pengukuran

Kompetensi Aparat Pengelola Keuangan Desa

Berdasarkan peraturan kepala badan kepegawaian negara nomor 7 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan standar kompetensi

manajerial pegawai negeri sipil, kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

Indikator yang di gunakan untuk mengukur kompetensi aparat pengelola keuangan desa adalah :1) Pengetahuan, 2) Keterampilan, 3) Sikap. (peraturan kepala badan kepegawaian negara nomor 7 tahun 2013)

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 (Ayat1 dan 2) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Indikator yang di gunakan untuk mengukur sistem pengendalian internal pemerintah adalah :1) Lingkungan Pengendalian, 2)Penilaian Risiko, 3) Kegiatan Pengendalian4)Informasi dan Komunikasi, 5) Pemantauan. (PP No.60 tahun 2008)

Partisipasi masyarakat

Menurut Lubis (2011:19) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Indikator yang di gunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat adalah :1) Memberikan Masukan kepada pemerintah desa, 2) Terlibat dalam rapat

paripurna, 3)Mengusulkan rencana anggaran, 4) memberikan dukungan terhadap rancangan anggaran desa, 5) Terlibat mengawasi dan melaporkan, 6) Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran, 7)memberikan usulan perubahan anggaran. (Sujarweni, 2015)

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.Nordiawan (2006: 35) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Indikator yang di gunakan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah : 1) Kepatuhan terhadap hukum, 2) penghindaran korupsi dan kolusi, 3)kepatuhan terhadap prosedur, 4) pelayanan publik yang responsive, 5) pelayanan publik yang cermat, 6) Adanya pelayanan publik dengan biaya murah, 7) Alternative program yang memberikan hasil yang optimal, 8) Mempertanggungjawab kan yang telah di buat, 9) Mempertanggungjawab kan kebijakan yang telah di ambil, 10) Mempertimbangkan dampak di masa depan (Mahmudi, 2011)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk menganalisis data berdasarkan atas hasil yang diperoleh dari jawaban responden terhadap masing-masing indikator pengukur variabel. Statistic deskriptif terdiri dari mean, minimum, maximum, dan standar deviasi. Adapun analisis deskriptif variabel penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 Statistik Deskriptif

Variabel	N	MIN	MAX	MEAN	Std. Deviasi
Kompetensi Aparat Pengelola Keuangan Desa	93	3	5	4,378136	0,507065
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	93	3	5	4,303226	0,482998
Partisipasi Masyarakat	93	3	5	4,270353	0,54971
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	93	3	5	4,35914	0,506202

Sumber: Data Olahan WarpPLS (2020)

Hasil Analisis Data Model Pengukuran (Outer Model) Convergent Validity

Tabel 2 Combined Loading and Cross-Loading

	X1	X2	X3	Y	P Value
I1	(0.596)	(0.944)	(0.808)	(0.903)	<0.001
I2	(0.928)	(0.883)	(0.565)	(0.883)	<0.001
I3	(0.948)	(0.965)	(0.679)	(0.840)	<0.001
I4	(0.916)	(0.942)	(0.828)	(0.871)	<0.001
I5	(0.962)	(0.896)	(0.595)	(0.875)	<0.001
I6	(0.972)		(0.515)	(0.827)	<0.001
I7			(0.663)	(0.843)	<0.001
I8				(0.876)	<0.001
I9				(0.843)	<0.001
I10				(0.847)	<0.001

Sumber: Data Olahan WarpPLS (2020)

Hasil output pada tabel 2 menunjukkan nilai loading factor dari setiap konstruk berada di atas 0.70 dengan p-value < 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa indikator tersebut telah memenuhi convergent validity.

Discriminant Validity

Hasil output pada tabel 3 menggambarkan bahwa akar kuadrat dari AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya, dan nilai AVE nya lebih besar dari 0,50, sehingga model mempunyai discriminant validity yang cukup.

Tabel 3 Tabel Hasil Korelasi Variabel Laten

	X1	X2	X3	Y
X1	(0.897)	0.009	0.127	0.197
X2	0.009	(0.927)	0.521	0.173
X3	0.127	0.521	(0.674)	0.236
Y	0.197	0.173	0.236	(0.861)

Sumber: Data Olahan WarpPLS (2020)

Composite Reliability

Tabel 4 Composite Reliability

Variabel	Composite	Cronbach
Kompetensi Aparat Pengelola Keuangan Desa	0.960	0.952
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0.968	0.968
Partisipasi Masyarakat	0.950	0.939
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	0.966	0.966

Sumber: Data Olahan WarpPLS (2020)

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Gambar 2

Model fit and quality indices
Average path coefficient (APC)=0.222, P=0.006
Average R-squared (ARS)=0.194, P=0.013
Average adjusted R-squared (AARS)=0.166, P=0.024
Average block VIF (AVIF)=1.039, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3
Average full collinearity VIF (AFVIF)=1.243, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3
Tenenhaus GoF (GoF)=0.372, small >= 0.1, medium >= 0.25, large >= 0.36
Simpson's paradox ratio (SPR)=1.000, acceptable if >= 0.7, ideally = 1
R-squared contribution ratio (RSCR)=1.000, acceptable if >= 0.9, ideally = 1
Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if >= 0.7
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=1.000, acceptable if >= 0.7

Berdasarkan gambar 2 di atas, nilai indeks dari APC adalah 0.222 dengan pvalue sebesar 0.006, untuk nilai indeks ARS adalah sebesar 0.194 dengan p-value sebesar 0.013, serta nilai indeks AARS adalah sebesar 0.166 dengan p-value sebesar 0.024. Berdasarkan kriteria, maka APC, ARS dan AARS telah terpenuhi yang mana memiliki nilai p-value < 0.05. Selanjutnya, nilai AVIF adalah sebesar 1,039 yang menunjukkan bahwa AVIF adalah lebih kecil dari 5, maka dapat disimpulkan bahwa model structural (inner model) dapat diterima.

Tabel 5 R-squared Coefficients

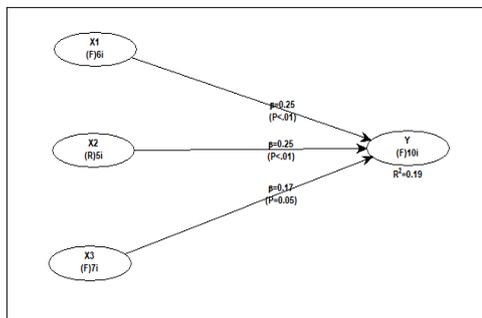
	R-squared Coefficients
Kompetensi Aparat Pengelola Keuangan Desa	
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	
Partisipasi Masyarakat	
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	0,194

Sumber: Data Olahan WarpPLS (2020)

Hasil output dari tabel 5 menunjukkan bahwa besarnya R-squared adalah 0,194, hal ini berarti 19,4 % variasi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat di jelaskan oleh variasi ketiga variable independen yaitu kompetensi aparat pengelola keuangan desa, system pengendalian internal pemerintah, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan sisanya (100%-19,4% = 81,6%) di jelaskan oleh sebab-sebab lain dari luar model.

Hasil Uji Hipotesis

Gambar 3 Model Struktural



Sumber: Data Olahan WarpPLS (2020)

Uji Hipotesis 1

Dalam gambar model struktural dapat dilihat bahwa pengaruh dari kompetensi aparat pengelola keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah sebesar 0.245. Koefisien kompetensi aparat pengelola keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desatersebut signifikan dengan nilai p (p-value) sebesar 0.006 atau lebih kecil dari 0.05, sehingga hipotesis di terima.

Uji Hipotesis 2

Dalam gambar model struktural dapat dilihat bahwa pengaruh dari sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah sebesar 0.250. Koefisien sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desatersebut signifikan dengan nilai p (p-value) sebesar 0.006 atau lebih kecil dari 0.05, sehingga hipotesis di terima.

Uji Hipotesis 3

Dalam gambar model struktural dapat dilihat bahwa pengaruh dari partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah sebesar 0.169. Koefisien partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desatersebut signifikan dengan nilai p (p-value) sebesar 0.045 atau lebih kecil dari 0.05, sehingga hipotesis di terima.

Pembahasan Penelitian

Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai p value adalah 0.006 dengan nilai beta (β) sebesar 0.245. Sehingga dapat dikatakan bahwa kompetensi aparat pengelola keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Di dalam hal pengelolaan keuangan desa di butuhkan skill yang bagus dan mempunyai pengetahuan yang luas mengenai cara pengelolaan keuangan desa (mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban) tersebut, agar pengelolaan keuangan desa bisa berjalan sesuai dengan prosedur dan mencerminkan pengelolaan yang akuntabel. Jika aparatur desa

berkompeten dalam mengelola keuangan desa tentu saja akan meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan desa tersebut. Sebaliknya jika aparatur tidak memiliki sumber daya yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentu saja akuntabilitas tidak akan tercapai.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Cheng, Engstrom, & Kattelus (2002) menyebutkan bahwa kompetensi yang di miliki aparatur pemerintah turut mempengaruhi akuntabilitas pemerintah desa. Dan juga sejalan dengan hasil penelitian dari yang di lakukan oleh Dwi Sapartiningshah, Suharno (2018), Ekasari Sugiarti dan Ivan Yudianto (2017), Putri Aulia (2018) bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai p value adalah 0.006 dengan nilai beta (β) sebesar 0.250. Sehingga dapat dikatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penyelenggaraan kegiatan dalam suatu pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan secara andal, mengamankan aset dan mendorong ketaatan terhadap

peraturan perundang – undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Internal. Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Sehingga semakin baik sistem pengendalian akan berimplikasi dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat dari Aikins (2011) berpendapat bahwa pengawasan pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui evaluasi dan perbaikan pengendalian internal, manajemen resiko dan proses tata kelola pemerintahan. Dan juga sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Ivan Yudianto dan Ekasari Sugiarti (2017), Yustika Rezkiyanti (2019), Arif Widyatama, Lola Novita, dan Diarespati (2017), yang berkesimpulan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai p value adalah 0.045 dengan nilai beta (β) sebesar 0.169. Sehingga dapat dikatakan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan asas pengelolaan desa yang di lakukan secara partisipatif, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran yang mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan. Akuntabilitas akan tercapai jika adanya partisipasi dari masyarakat yang menyampaikan segala aspirasi serta kontribusi dalam proses pengelolaan keuangan desa. sehingga semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat dari Crook dan Sverrisson dalam Devas dan Grant (2003:309) Akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Dan juga sejalan dengan hasil penelitian Dalam penelitian yang di lakukan oleh Putri Aulia (2018), Siti Umaira dan Adnan (2019), Dwi Sapartiningsih, Suharno (2018), Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

1. Kompetensi aparat pengelola keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi yang di miliki oleh aparat pengelola keuangan desa maka akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tersebut.
2. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hail ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah dari desa tersebut maka akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
3. Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hail ini menunjukkan bahwa semakin baik Partisipasi masyarakat dari desa tersebut maka akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga variable independen

yaitu kompetensi aparat pengelola keuangan desa, system pengendalian internal pemerintah, dan partisipasi masyarakat, sedangkan masih banyak variable lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Saran

1. Bagi peneliti di harapkan dapat menambah variabel independen lain terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, mengingat ketiga variabel independen hanya mempengaruhi variabel dependen sebanyak 19%, sehingga masih banyak variabel lain yang bisa mempengaruhi variabel akuntabilitas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2. Peneliti selanjutnya juga di harapkan menambah jumlah desa yang di teliti sehigga hasil penelitian lebih dapat di generalisasi.
3. Bagi aparat pemerintah desa. Penelitian ini setidaknya sedikit menggambarkan mengenai kompetensi aparat pengelola dana desa, sistem pengendalian internal pemerintah, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sehingga dengan hasil penelitian ini pemerintah desa dapat membenahi kompetensi aparat pengelola dana desa, sistem pengendalian internal pemerintah, ddan partisipasi masyarakat aagar akuntabilitas pengelolaan keuangan desa semakin baik.
4. Bagi masyarakat. Masyarakat sebagai agen dapat melihat dan menilai mengenai pertanggungjawaban atas dana anggaran yang telah mereka berikan kepercayaan kepada pemerintah desa Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya di kecamatan tembilahan hulu, tempuling, kempas, dan batang tuaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Aikins, Stephen K, 2011, an examination of government internal audit's role in improving financial performance, *Journal Of Public Finance And Management*, 11 (4): 306-337
- Arif Widyatama, Lola Novita, Diarespati, 2017, Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2 (2017): 1-20.
- Cheng, R.H., H.E. John., C. Susan., dan K. Fall. 2002. Educating government Financial Managers: University collaboration between business.
- Dian Astri Budiana, 2019, The effect of village device competencies and internal control system on a accountability of village management. *Scientific Research Journal (SCIRJ)*, Volume VII, Issue I, January 2019, ISSN 2201-2796.
- Dedi Nordiawan (2006), *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Devas, Nick., dan Grant, Ursula. 2003. Local Government Decision Making- Citizen Participation and Local Accountability: Some Evidence From Kenya and Uganda. *Public Administration and Developmen*. Vol.23, Page 307-306.
- Dwi Saptaningshih, Suharno, 2018, Analisis Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena di wilayah Kabupaten Sragen. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* Vol. 14 No. 1 Maret 2018: 100 – 114.
- Ekasari Sugiarti dan Ivan Yudianto, 2017, Analisis Faktor Pada Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang), *PROCEEDINGS* ISSN- 2252-3936.
- Fatimah Azmi Nainggolan, 2017, peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa (Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017)
- Ghozali, Imam, 2006, *Structural Equation Modeling, Metode Alternative Dengan Partial Least Square*. Edisi 2, Badan Penerbit universitas Diponegoro: Semarang.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Giofani Inge Aria H, 2019, *akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*
- Ibnu Wardana, 2016, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada pemerintah desa di kabupaten magelang)*, lib.unnes.ac.id
- Ivan Yudianto dan Ekasari Sugiarti, 2018, Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

- Jugiyanto Dan Abdilllah, 2009, Konsep Dan Aplikasi Plls, Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta
- Lalita Ivana Maria Ladapase, 2019, pengaruh kompetensi aparatur, motivasi aparatur, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan nelle, kecamatan koting, dan kecamatan kangae, kabupatensikka.
repository.usd.ac.id
- Mahmudi, 2010, Manajemen Sektor Publik, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Miftahuddin, 2018, Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)
- Muhammad Rosyidi, 2018, Pengaruh Transparansi, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar).
- Novindra Dwi Setiana, Nur Laila Yuliani, 2017, Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, University Research Colloquium 2017, ISSN 2407-9189.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 (Ayat 1 dan 2) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- PutriAulia, 2018, Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota
- Rita Martini, NaufalLianto, Sukmini Hartati, Zulkifli Zulkifli, Endah Widyastuti, 2019, system pengendalian intern pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di kecamatan Sumbawa.
- Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, Hendrik Gamaliel, 2017, Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill".E-ISSN 2715-1859.
- Sidiq Wahyu Ramadan, 2019, pengaruh kualitas sumber daya manusia, transparansi, dan pemanfaatan teknologi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
eprints.ums.ac.id

- Siti Umaira dan Adnan, 2019, Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber daya Manusia, dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi dan akuntansi (JIMEKA), vol. 4, no. 3 (2019) hal.471-481. E-ISSN 2581-1002.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tarjo, 2019, pengaruh kompetensi aparat desa dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas dana desa, jurnal tata sujata vol. 5, no. 2 september 2019, P-ISSN 2442-9023.
- Ulfah Waladiyah, 2018, pengaruh kepatuhan atas perundang-undangan, kompetensi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Eptints.polsri.ac.id
- Yustika Rezekiyanti, 2019, Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
- merdeka.com, mantan kades dan sekdes di inhil jadi tersangka korupsi dana desaRp 309 juta, pada tanggal 10 agustus 2019, <https://m.merdeka.com/peristiwa-mantan-kades-dan-sekdes-di-inhil-jadi-tersangka-korupsi-dana-desa-rp-309-juta.html>
- kontan.co.id, kejaksaan agung temukan enam masalah danadesa, pada tanggal 10 agustus 2019, <https://www.google.co.id/amp/amp/kontan.co.id/news/kejaksaan-agung-temukan-enam-masalah-dana-desa>
- riauonline.co.id, dana desa riau 2018 banyak kendalanya ?ini penjelasan kakanwil perbendaharaan, pada tanggal 10 agustus 2019, <https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/rea/2019/01/31/dana-desa-riau-2018-banyak-kendalanya-ini-penjelasan-kakanwil-perbendaharaan>